LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN I TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perlu dilakukan evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sampai Triwulan I melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada APBD Tahun Anggaran 2025 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkanpencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
4. Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2024.
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/263/K/411.013/2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah menilai capaian target kinerja, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja.

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

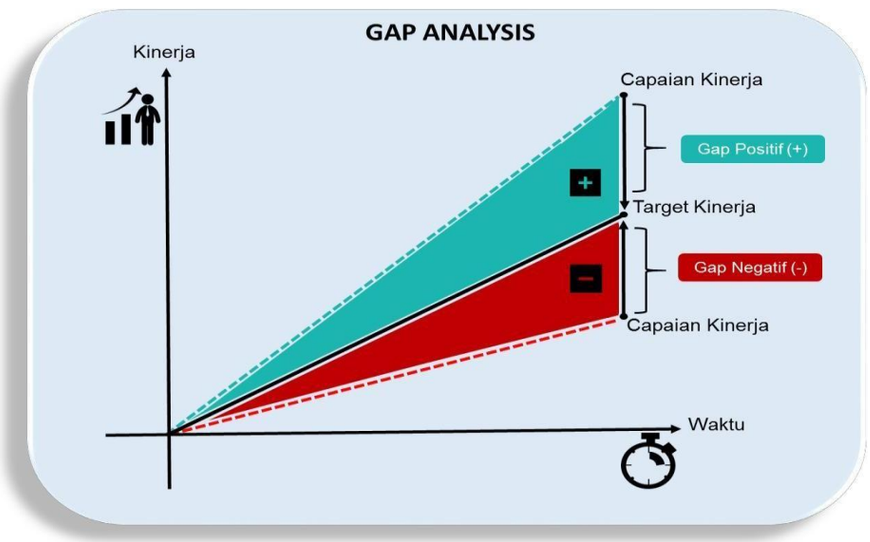
No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



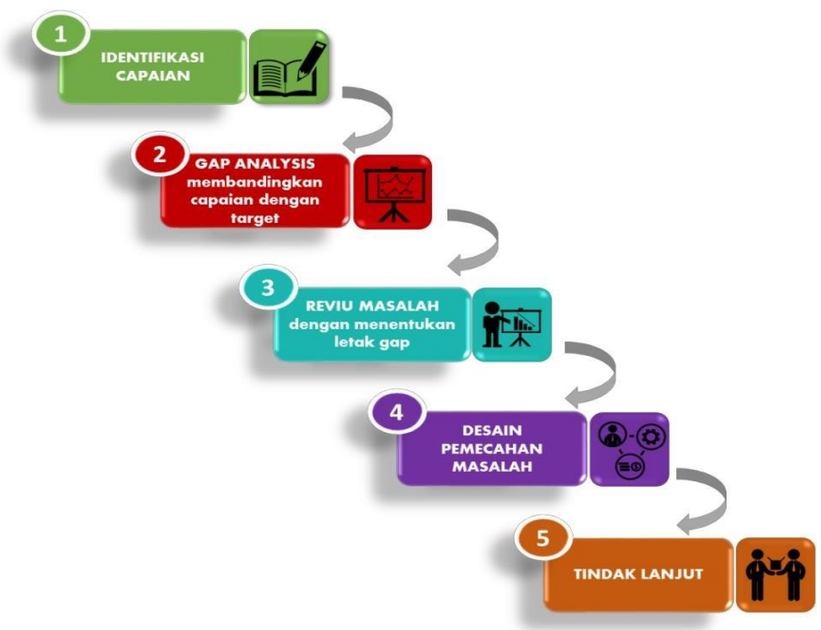
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat denganmenggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Tujuan Meningkatnya Kemandirian Desa dan Keberdayaan Masyrakat Guna Mendukung Penanggulangan Kemiskinan	1. Indeks Desa Membangun IDM 2. Tingkat Status Perkembangan Desa	11,74 %	0,78191 %	29,9 %
	Sasaran : Meningkatnya Jumlah Desa Mandiridan Status Perkembangan Desa		15%	15%	100%

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Pencapaian status Desa Mandiri.

Kegiatan pemutakhiran IDM di Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2025

1. Telah mencapai target yang di tentukan bahkan melebihi tercapai 79 Desa (29,9%)

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
1.	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***Hasil Survei Kepuasan Masyarakat***	**80**	**5.678.364.978**	**91,81%**	**5.451.070.674**	***91,34%***	***26,25%***
1.1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu**	**14 Dokumen**	**30.880.000**	**7 Laporan**	**27.827.250**	39,53%	***45,99%***
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14 Laporan	39.307.200	7 Laporan	27.827.250	39,53%	***45,99%***
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu**	**105 Dokumen**	**5.147.201.059**	**96 Dokumen**	**463.146.691**	**24,90%**	**24,77%**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/Bulan	5.134.488.059	**31 Orang/12 bln**	462.426.691	**48,82%**	**24,73%**
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD	2 Laporan	5.691.000	2 Laporan	720.000	**66,67%**	**22,29%**

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuang Bulan/ Triwulanan/ semesteran SKPD	72 Laporan	7.022.000	9 Laporan	0	**37,75%**	**49,85 %**
1.3.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat Kehadiran ASN**	0	-				
1.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai						
1.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta adtribut Kelengkapannya						
1.4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia**	**3.612 Dokumen**	**510.255.230**	**- Dokumen**	**21.706.324**	**1,99 %**	41,30%
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponeninstalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang di sediakan	1 Paket	9.998.900	- paket	6.691.500	**33,33 %**	62,32%
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang disediakan	8 Paket	57.975.400	2 Paket	9.651.220	**41,67%**	**25,55%**

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	2 Paket	2.152.500	- paket	**0**	33,33%	**14,52%**
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	12 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	360.000	**133,33%**	21,00 %
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	550 Laporan	277.928.000	1 Laporan	376.000	32,50%	***48,49%***
1.4.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penata usahan arsip dinamis pada SKPD	3.000 Dokumen	28.566.000	701 Dokumen	4.627.604	41,12%	***38,26%***
1.5.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Yang Tersedia Untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**6 unit**	**61.630.308**	**- Unit**	**0**	30,04 %	***39,91%***
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas /Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatanyang di sediakan						
1.5.2	Pengadaan Kendaraan Operasional / Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/ lapangan yang disediakan						
1.5.3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yangdisediakan	0 unit	0	0 Unit	0	32,70%	*45,40%*

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
1.5.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yangdi sediakan	6 Unit	61.630.308	0 Unit	0	31,91 %	***38,50%***
1.6.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat**	**50 Laporan**	**85.312.000**	**- Laporan**	**14.934.603**	17,33%	***24,81%***
1.6.1	Penyedian Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	2 Laporan	26.276.000	1 Laporan	4.377.603	50,00%	***36,65%***
1.6.2	Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 laporan	62.000.000	6 laporan	10.557.000	20,83%	***22,02%***
1.7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Yang Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Layak Fungsi**	**69 Unit**	**511.366.824**	**-Unit**	**79.202.106**	22,25%	***25,45%***
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara yang dibayarkan	7 Unit	295.862.443	2 Unit	32.107.300	69,44%	***38,39%***
1.7.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di pelihara	20 Unit	3.302.754	0 Unit	0	20,62%	***9,27%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 Unit	38.850.000	5 Unit	0	67,16%	***25,49%***
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan banguan gedung kantor lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	2 Unit	173.351.627	0 Unit	47.094.806	100%	***15,96%***
2.	***PROGRAM PENATAAN DESA***	***Persentase Desa Yang Mendapatkan FasilitasiPenataan Desa***	**25%**	**63.964.100**	0 %	**0**	108%	***15,07%***
2.1	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa**	**66 Desa**	**63.964.100**	**0 Desa**	**0**	33,33%	***15,07%***
2.1.1	Pembentukan Penghapusan ,Penggabungan dan Perubahan Status	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	**1 Desa**	**11.017.650**	**0**	**0**	0,00%	***0,00%***
2.1.2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya	30 Desa	30.685.000	0 Desa	0	44,44%	***13,94%***
2.1.3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya	25 Desa	7.779.200	0 Desa	0	50%	***13,77%***
2.1.4	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penamaandan Kode Desa						

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
2.1.5	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat ,Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota						
2.1.6	Fasilitasi sarana dan Pra Sarana Desa	Jumlah sarana dan Pra Sarana Desa	10 Unit	14.482.250	0 Unit	0	38,33%	***18,52%***
3.	***PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA***	***Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan***	**87%**	**121.864.950**	0	12.055.200	80,46%	***25,89%***
3.1.	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan**	**230 Desa**	121.864.950	0 Dokumen	12.055.200	80,46%	***25,89%***
3.1.1	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Jumlah Dokumen Kerja sama antar Desa	10 Dokumen	84.693.850	6 Dokumen	7.940.588	43,33%	***25,68%***
3.1.2	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kerja sama antarDesa dengan pihak Ketiga	15 Dokumen	5.047.750	0 Dokumen	0	33,33%	***12,23 %***
3.1.3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	32.123.350	0 Dokumen	4.114.612	33,33%	***31,00%***
4.	***PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA***	***Persentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola***	**100%**	**3.318.503.825**	0%	**607.667.840**	38,00%	***44,18%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
		Pemerintahan Desa						
4.1	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa**	**100%**	**3.318.503.825**	0%	**607.667.840**	38,00%	***44,18%***
4.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	4 Dokumen	8.201.900	0 Dokumen	0	33,33 %	***16,39%***
4.1.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	528 Dokumen	59.168.500	0 Dokumen	0	100%	***37,37%***
4.1.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	264 Dokumen	25.273.500	0 Dokumen	0	100%	***21,09%***
4.1.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan KeuanganDesa	264 Dokumen	2.907.391.775	0 Dokumen	574.010.340	99,62 %	***51,09%***
4.1.5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100 Orang	8.400.500	0 Orang	33.657.500	28,57%	***93,88%***
4.1.6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerja Sama antar Desa	80 Dokumen	39.704.750	0 Dokumen	0	100%	***10,61%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
4.1.7	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	Jumlah Laporan hasil Penyelengggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	167.358.500	0 Laporan	0	100%	***12,55%***
4.1.8	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	7.279.400	0 Laporan	0	33,33%	***3,53%***
4.1.9	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen ProfilDesa	264 Dokumen	9.056.000	0 Dokumen	0	100%	***17,16%***
4.1.10	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Aset Desa	264 Dokumen	29.362.200	0 Dokumen	0	100%	***32,72%***
4.1.11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Kapasitas	100 Orang	6.078.800	0 orang	0	100 %	***16,27%***
4.1.12	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan HasilPembinaan Laporan Kepala Desa	2 Laporan	7.618.000	1 Laporan	0	66,67 %	***8,24%***
4.1.13	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumalah dokumen hasil evaluasi perkembanganDesa serta lomba Desa	21 Dokumen	43.610.000	0 Dokumen	0	100%	***11,98%***
5	***PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT***	***Persentase Desa Yang Kapasitas Kelembagaannya diberdayakan***	**45%**	**614.644.600**	**0%**	**8.855.200**	49,12 %	***34,15%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
5.1.	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Desa Yang Kelembagaannya diberdayakan**	**118 Desa**	**614.644.600**	**0 Desa**	**6.855.200**	30,30 %	***34,15 %***
5.1.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan, Lembaga kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa danmasyarakat Hukum adat	300 Dokumen	76.049.450	0 Dokumen	0	33,33%	***7,43%***
5.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa dan Masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	384 Lembaga	64.214.150	0 Lembaga	0	46,53%	***39,16%***
5.1.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekomoni Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan	2 Dokumen	14.842.800	0 Dokumen	0	35,00%	***36,92%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
		Pendapatana Asli Desa						
5.1.4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemenfataan teknologi Tepat Guna	2 Laporan	62.784.000	0 Laporan	0	33,33%	***187,97%***
5.1.5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan hasil fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	29.102.700	0 Laporan	0	33,33%	***89,99%***
5.1.6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteran Keluarga PKK	110 Dokumen	367.651.500	20 Dokumen	6.855.200	106,56%	***28,01%***
				10.346.379.666		**1.233.395.214**	**61,32%**	**32,02 %**

I. Analisis capaian kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2025

- ***Dalam Pelaksanaan Program, Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Keluaran sebagai berikut :***
  1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Senilai .....
  2. Rankir 2025, Sakip terlaksana di Tribulan I.
  3. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi berupa jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan hasil Koordinasi serta Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  4. Jumlah ASN dengan mendapat Gaji dan Tunjangan.
  5. Laporan Keuangan tepat waktu, Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Bulanan, Triwulan I.
  6. Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik
  7. Jumlah Paket Bahan logistik
  8. Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
  9. Jumlah Laporan rapat Koordinasi
  10. Jumlah Penataan Arsip Dinamis
  11. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya
  12. Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat
  13. Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  14. Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan pajak kendaraan
  15. Jumlah Pemeliharaan Mebel yang di pelihara
  16. Jumlah Pemeliharaan Peralatan Mesin yang di pelihara
  17. Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung yang di pelihara.

- ***Dalam pelaksanaan Program Penataan Desa telah direalisasi keluaran yaitu data desa yang mendapatkan fasilitasi penataan desa***.

  - Realisasi keluaran Program Penataan desa didukung keluaran dari kegiatan penyelenggaraan penataan desa berupa : data desa yang mendapatkan fasilitasi di bidang penataan desa yang didukung oleh sub kegiatan :
    1. Fasilitasi Tata Wilayah Desa dengan keluaran : data desa yang melaksanakan penetapan tata wilayah desa (Penetapan dan Penegasan Batas Desa sesuai Permendagri 45 tahun 2016).

2. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa dengan keluaran jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi kewenangan desa. Fasilitasi dilaksanakan melalui Bimtek tentang kewenangan desa dan monitoring evaluasi pelaksanaan kewenangan desa.
3. Fasilitasi Sarana Prasarana Desa dengan keluaran : Jumlah Unit Sarana Prasarana Desa hasil fasilitasi.

- ***Dalam pelaksanaan Program Kerja sama Desa telah direalisasi keluaran yaitu data desa yang mendapatkan fasilitasi kerjasama desa***.
  - Realisasi keluaran Program Program Kerjasama Desa didukung keluaran dari kegiatan penyelenggaraan kerjasama desa berupa : data desa yang mendapatkan fasilitasi di Kerjasama desa yang didukung oleh sub kegiatan :
    1. Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam kabupaten/kota dengan keluaran : jumlah dokumen hasil fasilitasi fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota
    2. Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dengan keluaran : jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga
    3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan keluaran : Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pembangunan Kawasan perdesaan

- ***Dalam pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa.***
  Bidang Bina Pemerintahan Desa:

Analisis Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2025

- Analisis Capaian Kinerja dalam pelaksanaan program administrasi pemerintahan desa Indikator keluaran adalah jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi tata kelola Administrasi Pemerintahan Desa.
- Realisasi keluaran program administrasi pemerintahan desa didukung keluaran dari kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa berupa desa yang mendapatkan fasilitasi tata kelola Administrasi Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dengan keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa.
3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dengan keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.
4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan keluaran : Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas.
5. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
6. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan keluaran Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
7. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dengan keluaran : Jumlah Dokumen Profil Desa Yang Tersusun.
8. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dengan keluaran : Jumlah Anggota BPD Yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas.
9. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa dengan keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa.
10. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

❖ ***Dalam pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa.***
Bidang Keuangan Aset dan Ekonomi Desa

➢ Analisis capaian kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Bidang Keuangan, Aset, dan Ekonomi Desa

Pada Triwulan I Tahun 2025, pada Triwulan Pertama Tahun Anggaran 2025 terdapat beberapa kebijakan dari pemerintah pusat yang sangat berdampak pada pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat antara lain:

Rencana pengalihan prioritas penggunaan dana desa dari anggaran untuk ketahanan pangan dialihkan ke modal penyertaan BUM Desa

Dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih.

- Realisasi Program Administrasi Pemerintahan Desa

Walaupun ada beberapa kebijakan Pemerintah Pusat yang belum pasti dalam implementasinya dikarenakan regulasi yang belum siap. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan kepada desa di kabupaten Nganjuk. Hal ini diimplementasikan pada 3 Subkegiatan, antara lain:

1. Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

   Tugas dan fungsi pembinaan pada subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa diimplementasikan dengan melaksanakan bimbingan teknis Pengelolaan Keuangan Desa kepada 264 Sekretaris Desa di Kabupaten Nganjuk.

   Disamping melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Bidang Keuangan, Aset, dan Ekonomi Desa juga melaksanakan Fasilitasi Penyaluran Dana Desa serta Alokasi Dana Desa, sampai dengan 31 Maret 2025 diperoleh kinerja sebagai berikut:

   Penyaluran Dana Desa: tersalur ke 262 Desa

   Penyaluran Alokasi Dana Desa : tersalur ke 263 Desa

   Hal ini menunjukkan bahwa ada 263 dokumen pengajuan DD maupun ADD yang sudah ditindaklanjuti dan sudah tersalur.

2. Subkegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa

   Wujud kerja sebagai upaya mencapai target kinerja Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa yang telah ditetapkan, Bidang Keuangan, Aset, dan Ekonomi Desa telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

   - Bimbingan Teknis Pengelolaan BUM Desa

   Bimbingan Teknis yang dilaksanakan berupa Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan BUM Desa yang dilaksanakan kepada 100 Direktur BUM Desa dan 100 Kepala Desa dari 100 desa di Kabupaten Nganjuk. Hal ini

merupakan tindak lanjut dari adanya kebijakan rencana pengalihan belanja anggaran yang mendukung Ketahanan Pangan ke Pembiayaan berupa Modal Pemnyertaan BUM Desa. Disamping itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk juga melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Lomba BUM Desa kepada 20 Kasi PMD pada 20 Kecamatan di Kabupaten Nganjuk.

3. Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Pada fasilitasi pengelolaan aset desa, difokuskan pada penyusunan draf Peraturan Bupati Nganjuk tentang Pengelolaan Aset Desa. Disamping kegiatan pembinaan yang dilakukan adalah evaluasi implementasi SIPADES 3.0 yang sampai dengan 31 Maret 2025 sudah diimplementasikan oleh 225 desa di Kabupaten Nganjuk.

- ***Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat***.

Analisis capaian kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2025 Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat data keluaran/output sebagai berikut:

a. Fasilitasi penataan LKD dengan output pemenuhan legalitas posyandu yang terdiri dari SK Tim pembina Posyandu Kabupaten, SK Tim pembina Posyandu Kecamatan, SK Tim pembina Posyandu Tk Desa, SK Posyandu (Kader dan pengurus) SK pemberian insentif Kader dan pengurus.
b. Pembinaan Gotong royong masyarakat dengan output terlaksananya penilaian pelaksanaan gotong royong serta keikutsertaan dalam penilaian tingkat provinsi.
c. Faslitasi pelaporan konvergensi stunting tingkat desa tahun 2024 dan pelaksanaan konvergensi stunting tingkat desa tahun 2025 (SK KPM).
d. Fasilitasi TPKKK Kabupaten nganjuk dengan output terlaksananya fasilitasi kegiatan pelantikan Ketua TPPKK kabupaten.

II. Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

1. **Karena Penggunaan Anggaran Untuk Triwulan I Tahun 2025 hasilnnya dari 2 Laporan yaitu Laporan Keuangan Tahun 2024 dan Laporan Ikhtisar Kinerja 2024**.

2. **Dalam pelaksanaan Program Penataan Desa telah direalisasi keluaran yaitu data Desa yang *mendapatkan fasilitasi penataan desa***

   - Realisasi keluaran Program Program Penataan desa didukung keluaran dari kegiatan penyelenggaraan penataan desa berupa : data desa yang mendapatkan fasilitasi di bidang penataan desa yang didukung oleh sub kegiatan :

     1. Fasilitasi Tata Wilayah Desa dengan keluaran : data desa yang melaksanakan penetapan tata wilayah desa (Penetapan dan Penegasan Batas Desa sesuai Permendagri 45 tahun 2016). Pada Tribulan I fasilitasi yang dilakukan adalah pendampingan pelaksanaan kesepakatan pemasangan pilar batas desa. Sedangkan untuk Verifikasi teknis dari Badan Informasi Geospasial dan verifikasi yuridis dari Kementrian

        Hukum dan Ham serta Kemendagri belum dilaksanakan. Hal ini dikarenakan untuk pelaksanaan verifikasi teknis dan yuridis menunggu

        jadwal dan informasi dari Dinas PMD Prov Jawa Timur.

     2. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa dengan keluaran jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi kewenangan desa. Pada tribulan I belum ada hasil desa yang mendapatkan fasilitasi kewenangan desa. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan rencana aksi program penataan desa, fasilitasi kewenangan desa dilaksanakan pada tribulan II.
     3. Fasilitasi Sarana Prasarana Desa dengan keluaran : Jumlah Unit Sarana Prasarana Desa hasil fasilitasi.Pada tribulan I fasilitasi sarana prasarana desa yang dilakukan adalah pendampingan kegiatan DPAL lanjutan BKK provinsi tahun 2024 yang tidak selesai dan dilanjutkan di tahun 2025.

3. **Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kerja Sama Desa telah direalisasi keluaran yaitu dokumen hasil fasilitasi kerja sama desa**.

   - Realisasi keluaran Program Peningkatan Kerja Sama desa didukung keluaran dari kegiatan fasilitasi kerja sama antar desa berupa : dokumen hasil fasilitasi Kerjasama desa yang didukung oleh sub kegiatan :

     1. Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota dengan keluaran : dokumen hasil fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota ada 5 dokumen yang terdiri dari
        a. laporan pertanggung jawaban kegiatan Bumdesma 2024,
        b. Dokumen Perencanaan kegiatan Bumdesma 2025,

c. Dokumen asistensi pertanggungjawaban dan perencanaan Bumdesma,
d. Dokumen perkembangan aset Bumdesma,
e. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Bumdesma 2025

2. Fasilitasi Kerjasama antar Desa Pihak Ketiga dengan keluaran : dokumen hasil fasilitasi Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga sebanyak 2 dokumen perjanjian kerjasama desa dengan pihak ketiga.
3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan keluaran : dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan perdesaan. Pada tribulan I kegiatan fasilitasi yang dilakukan masih pada tahap mengaktifkan kembali Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang sudah dibentuk tahun 2019 dan pendampingan dalam menyusun program kerja.

4. Dalam pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa telah direalisasi keluaran yaitu
Bidang Bina Pemerintahan Desa.

- Realisasi Keluaran Progran Administrasi Pemerintahan Desa didukung keluaran dari kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa berupa Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

    1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa sebanyak 1 dokumen yaitu Rekapitulasi Laporan Administrasi Pemerintahan Desa, pada Tribulan I ini dalam Proses fasilitasi pembinaan dan pengawasan.
    2. Fasilitasi Produk Hukum Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa sebanyak 528 dokumen dilaksanakan mulai pada tribulan II, III dan IV.
    3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan realisasi keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yaitu sebanyak 264 Dokumen, pada tribulan I dilaksanakan sosialisasi reviu perubahan RPJMDesa.

4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas yaitu 50 orang akan dilaksanakan pada tribulan III.
5. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa yaitu 1 Laporan, dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 8 tahun sehingga tahun ini belum dilakukan pemilihan kepala desa. Sub Kegiatan ini dipergunakan untuk pembentukan Raperda tentang Desa yang pada tribulan I ini sedang dilaksanakan proses penyusunan Naskah Akademik dan Proses penyusunan draf Raperda tentang Desa.
6. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu 1 Laporan. Pada tribulan I dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi pemberhentian perangkat desa karena usia sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Tribulan II.
7. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun yaitu sebanyak 264 dokumen. Sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada tribulan II dan Tribulan III.
8. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD realisasi keluaran adalah Jumlah Anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas yaitu 50 orang. Sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada tribulan III.
9. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa yaitu 2 Laporan. Sampai dengan tribulan I kepala Desa yang telah menyusun Laporan pertanggungjawaban akhir tahun sebanyak 169 Desa atau 64 %.
10. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan realisasi keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan yaitu 21 Dokumen. Sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada tribulan III.

5. **Dalam pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa telah direalisasi keluaran yaitu**

   Bidang Keuangan Aset dan Ekonomi Desa

   Adapun target keluaran yang telah dilaksanakan dalam pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa:

   1. Fasilitasi penyaluran dana Transfer desa kepada 264 desa
   2. Bimtek pengelolaan keuangan desa kepada 264 desa
   3. Bimbingan Teknis Peningkatan Pemberdayaan BUM Desa kepada 80 BUM Desa.
   4. Fasilitasi penyelesaian permasalahan aset desa.

6. **Realisasi keluaran Program Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dimaksud didukung keluaran dari kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota berupa : data desa yang Kelembagaannya diberdayakan melalui peningkatan kapasitas. Didukung oleh sub kegiatan :**

   1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan keluaran : 83 SK Posyandu
   2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan keluaran : 0
   3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan keluaran 0
   4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dengan keluaran : 0
   5. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan keluaran : 0, tapi sudah proses pelaksanaan kegiatan
   6. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan keluaran : 21 dokumen fasilitasi

III. Analisis realisasi keuangan Perangkat Daerah Tahun 2025

- **Realisasi Keuangan pada Program Dinas PMD Tahun 2025 belum dapat** direalisasi sesuai dengan rencana Anggaran Kas di karenakan masih belum secara maksimal pelaksanaan kegiatan di bidang-bidang serta akan dilaksanakan di Tribulan II.

- **Realisasi keuangan Program Penataan Desa dan Tahun 2025 belum** dapat direalisasi sesuai dengan Rencana Anggaran Kas karena
  1. Kegiatan fasilitasi kewenangan desa sudah dilaksanakan namun realisasi keuangan masih dalam proses.
  2. Kegiatan fasilitasi sarpras desa yang bersumber dari BKK kabupaten sudah dilaksanakan di tribulan I namun pembayaran kegiatan baru bisa terealisasi di tribulan berikutnya.
  3. Kegiatan fasilitasi tata wilayah desa sudah dilaksanakan di tribulan I namun pembayaran kegiatan baru bisa terealisasi di tribulan berikutnya.

a. Realisasi keuangan Program Peningkatan Kerja Sama Desa dan Tahun 2025
   1. Kegiatan fasilitasi Kerjasama Desa antar desa dalam kabupaten/ kota pada tribulan I sudah dilaksanakan dan sudah terealisasi sebesar Rp. 7.940.588,-
   2. Kegiatan fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga baru dilaksanakan pada tribulan ke dua sesuai anggaran kas dan rencana aksi kegiatan Penataan Desa.
   3. Kegiatan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan pada tribulan I sudah terealisasi sebesar Rp. 4.114.612,-

b. Analisis Realisasi Keuangan Perangkat daerah tahun 2025

   Realisasi Keuangan Program Administrasi Pemerintahan Desa pada Bidang Bina Pemerintahan Desa tahun 2025.

   Realisasi Keuangan pada Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelengagaran Administrasi Pemerintah desa Pada Triwulan I didukung oleh sub kegiatan Sbb:

   1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp 8.201.900,00 realisasi keuangan dalam proses pengajuan sehingga baru dapat terealisasi di tribulan berikutnya.
   2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dengan Anggaran sebesar Rp 59.168.500,00 sesuai dengan anggaran kas dilaksanakan di tribulan II, III, dan IV.

3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Anggaran sebesar Rp 25.273.500,00 realisasi keuangan tribulan I pada proses pengajuan sedangkan sesuai anggaran kas kegiatan juga dilaksanakan di tribulan II dan Tribulan III.
4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 8.400.500,00 sesuai anggaran kas kegiatan ini dilaksanakan pada tribulan III.
5. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan anggaran sebesar Rp 167.358.500,00 realisasi keuangan dalam proses pengajuan sehingga baru dapat terealisasi di tribulan berikutnya.
6. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan anggaran Rp 7.279.400,00 sub kegiatan ini dilaksanakan pada tribulan II.
7. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dengan anggaran sebesar Rp 9.056.000,00 sub kegiatan ini dilaksanakan pada tribulan II.
8. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dengan anggaran sebesar Rp 6.078.800,00 sub kegiatan ini dilaksanakan pada Tribulan II.
9. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa dengan anggaran sebesar Rp 7.618.000,00 realisasi keuangan dalam proses pengajuan sehingga baru dapat terealisasi pada tribulan berikutnya.
10. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 43.610.000,00 sub kegiatan ini dilaksanakan pada tribulan III.

❖ **Realisasi Keuangan Program Keuangan Aset dan Ekonomi Desa**

Adapun target keluaran sampai akhir tahun 2025 dan sedang proses penyusunan padaTriwulan I adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi penyaluran dana Transfer desa kepada 264 desa sudah tersalurkan ke 263 desa.
2. Bimtek pengelolaan keuangan desa kepada 264 desa sudah terlaksana
3. Bimbingan Teknis Peningkatan Pemberdayaan BUM Desa pada 80 BUM Desa.
4. Fasilitasi penyelesaian permasalahan aset desa.

- **Realisasi keuangan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Tahun 2025 belum dapat direalisasi sesuai dengan Rencana Anggaran Kas karena kegiatan pembinaan pokja PKK akan dilaksanakan setelah hari Raya Idul Fitri
  - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Anggaran sebesar Rp. **76.049.450,-** realisasi keuangan sebesar 0 atau 0%
  - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Anggaran sebesar Rp **64.214.150,-** realisasi keuangan sebesar realisasi keuangan sebesar 0 atau 0%
  - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Anggaran sebesar Rp. **14.842.800,-** realisasi keuangan sebesar 0 atau 0%
  - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Anggaran sebesar Rp. **62.784.000**,- realisasi keuangan sebesar 0 atau 0%
  - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Anggaran sebesar Rp. **29.102.700**,- realisasi keuangan sebesar **9.123.000**,- atau **31.35%**
  - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Anggaran Sebesar Rp. **367.651.500,-** realisasi keuangan sebesar Rp **35.978.200,-** atau **9.79%**

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
1	Tujuan Meningkatnya Kemandirian Desa	Dengan kegiatan Pemutakhiran Data Desa bersumber dari Data Profil Desa	Masih Banyaknya jumlah Desa dengan status indeks Desa Membangun dalam katagori berkembang dan Maju
2	Sasaran: 1 . Meningkatnya Kualitas Penataan Desa 2. Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Desa 3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa 4. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Desa	Adanya Program peningkatan Kapasitas SDM Dinas PMD dan Desa baik dari Kementerian dan Dinas PMD Provinsi Jatim.	Tenaga Pendamping Desa belum memiliki kemampuan yang merata dalam pendampingan dan belum sesuai harapan.
3		Regulasi tentang Desa semakin lengkap.	Masih adanya regulasi yang tumpang tindih.
4		Adanya kegiatan evaluasi dan perlombaan yang memacu semangat dan motivasi.	Kemampuan SDM dalam memahami regulasi yang berlaku secara menyeluruh.
5		Kebijakan ekonomi yang berpihak pada urusan pemberdayaan masyarakat.	Kondisi keberdayaan dan ketahanan ekonomi masyarakat yang masih rendah/ lemah.
6		Tersedianya dukungan anggaran APBD untukurusan pemberdayaan masyarakat.	Kondisi keberdayaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat masih rendah.
7		Tersedianya sumber daya alam (SDA) yang potensial untuk dikembangkan.	Terbatasnya kualitas sikap, nilai dan budaya gotong royong pada masyarakat untuk menuju kemandirian.

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
8		Potensi eksistensi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang.	Terbatasnya motivasi dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam (SDA).
9		Keterbukaan informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat	Terbatasnya kemampuan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disajikan dalam tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	**2**	**3**	**4**
1	**PROGRAM PENATAAN DESA**		
2	**Penyelenggaraan Penataan Desa**		
3	Pembentukan Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status	Telah dilakukannya kegiatan rutin update status desa secara berkala setiap tahun sehingga mudah untuk koordinasi pelaksanaan kegiatan	Pada tahun 2025 ini Adanya peralihan dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID) yang sebelumnya 3 indikator menjadi 6 indikator maka perlu sosialisasi dan pendampingan yang intensif kepada desa pada saat melakukan pemutakhiran data indeks desa sehingga tidak terjadi penurunan status desa. Karena jumlah kuesioner yang banyak (1879 pertanyaan) memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengisian

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
4			Pemahaman yang keliru dari pemerintah desa yang tidak mau meningkat status desanya karena takut anggaran Dana Desa Berkurang
5			Pada pelaksanaan update status desa, pemerintah desa terlalu bergantung pada pendamping desa
6	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Perpres no 23 tahun 2021 dan Permendagri 45 tahun 2016	Dukungan anggaran APBD yang kurang untuk pelaksanaan fasilitasi tata wilayah desa
7		Koordinasi antara Dinas PMD Provinsi, Badan Informasi dan Geospasial dengan Dinas PMD Kabupaten selalu intens untuk percepatan kegiatan tata wilayah desa	Hasil pelaksanaan PPBDes harus mendapatkan berita acara verifikasi teknis dari BIG sebagai dasar penyusunan Perbup dan verifikasi yuridis dari Kemenkumham dan Kemendagri yang jadwalnya ditentukan oleh provinsi/ pusat sehingga memperlambat penyusunan perbup
8			Pemerintah Daerah tidak mempunyai tenaga teknis sehingga pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga/ swakelola tipe 2
9	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Dukungan anggaran dari APBD untuk kegiatan fasilitasi penataan kewenangandesa	Belum semua pemerintah desa memahami tentang perdes kewenangan desa dan implementasinya

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
10		Perbup 35 tahun 2016 tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dan telah ditindaklanjuti oleh 264 desa yang sudah menyusun perdes kewenangan desa	
11	Fasilitasi sarana dan Pra SaranaDesa	Dukungan anggaran dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten untuk kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana desa	Keterbatasan waktu pelaksanaan karena sarpras desa yang bersumber dari BKK baru bisa dilaksanakan setelah PAK
12	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**		
13	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**		
14	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	PP no 11 tahun 2021, Permendagri no 96 tahun 2017, Permendesa no 15 tahun 2021 dan perbup no 4 tahun 2022 sebagai dasar pelaksanaan fasilitasi kerjasama anatar desa	Belum semua kegiatan kerjasama antar desa membentuk BKAD
15		Dukungan anggaran dari APBD untuk kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa	Kurangnya motivasi dari pengelola Bumdesma untuk membentuk unit usaha baru selain DBM
16		Telah bertransformasinya kegiatan pengelolaan DBM Eks PNPM menjadi Bumdesma Lkd	

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
17	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Permendagri 96 tahun 2017	Perjanjian Kerja Sama yang dibuat masih sederhana dan belum menunjukkan menguntungkan bagi pemerintah desa
18		Dukungan anggaran dari APBD untuk kegiatan fasilitasi kerjasama antara desa dengan pihak ketiga	Belum semua desa yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga melaporkan kepada Dinas PMD sehingga belum bisa memfasilitasi semua desa dan belum teridentifikasi semua permasalahan
19	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Permendesa nomor 5 tahun 2016	Setelah pembentukan BKAD dan Bumdesma Kawasan tidak ada pendampingan sehingga tidak ada program kerja
20		Perbup nomor 11 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Telah ditetapkannya Kawasan Perdesaan dengan SK Bupati Nganjuk Nomor 188/70/K/411.013/2016	Masing-masing desa masih memikirkan ego sektoral masing masing dan belum berfikir secara holistik dan kompherensif untuk bersama2 membangun kawasan perdesaan
21		Adanya dukungan anggaran dari APBD untuk fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Belum dibuat perencanaan pengembangan kawasan yang matang dan belum ada penyertaan modal dari desa untuk pengembangan kawasan perdesaan
22		Telah dibentuk BKAD Kawasan dan Bumdesma Kawasan	

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
23	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**		
24	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**		
25	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	PP no 11 tahun 2021, Permendagri no 96 tahun 2017, Permendesa no 15 tahun 2021 dan perbup no 4 tahun 2022 sebagai dasar pelaksanaan fasilitasi kerjasama anatar desa	Belum semua kegiatan kerjasama antardesa membentuk BKAD
26		Dukungan anggaran dari APBD untuk kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa	Kurangnya motivasi dari pengelola Bumdesma untuk membentuk unit usaha baru selain DBM
27	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		
28	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**		
29	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.	Aparat Pemerintahan Desa yang kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam menjalankan tugas administrasi. Kurangnya memahami prosedur administrasi yang benar,pengelolaan data, atau penggunaan teknologi informasi yang efektif.

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
30		Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa	
31	Fasilitasi Penyusunan Produk HukumDesa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Keterbatasan SDM Perangkat Desa
32		Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa	Tidak tepat waktu dalam tahapan penyusunan produk hukum desa
33		SK Petunjuk Teknis Penyusunan APBDes	
34		Tim Evaluasi dan klarifikasi penyusunan produk hukum desa	
35	Fasilitasi Penyusunan PerencanaanPembangunan Desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Keterbatasan kemampuan SDM Perangkat Desa
36		Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa	Keterbatasan tenaga ahli dalam bidang perencanaan
37		Tim Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
38	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Anggaran APBD untuk Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa, Aplikasi SISKEUDES, Peraturan Bupati No 57 jo. Peraturan Bupati Nganjuk No. 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Kurangnya SDM untuk membina dan melaksanakan pendampingan, monitoring, evaluasi pelaksanaan APB Desa. Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan di Desa yang kurang optimal.

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
39	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Keterbatasan Kemampuan SDM Perangkat Desa
40		Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa	Keterbatasan penguasaan teknologi informasi
41		Media Pembelajaran Mandiri Aparatur Pemerintah Desa (Sibermata Desa)	
42		Perangkat Desa Mengikuti Program P3PD dari Kemendagri	
43	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Anggaran APBD untuk Kegiatan Pembinaan BUM Desa, Anggaran Penyertaan Modal dari APB Desa	Tidak adanya regulasi yang mewajibkan BUM Desa memberikan / mengirimkan data laporan pertanggungjawaban BUM Desa
44	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Adanya Kepala Desa yang bermasalah dengan hukum
45		Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Pelayanan terhadap masyarakat menjadi terhambat
46		Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun	UU Nomor 3 Tahun 2024 belum ditindaklanjutan PP yang mengaturnya
47	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Proses pemberhentian dan pengangkatan terhambat karena UU 3/2024 belum adanya PPnya.

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
48		Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Belum ada peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024
49	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Proses penyusunan profil desa membutuhkan waktu dan upaya yang cukup. Namun, desa seringkali memiliki jadwal yang padat dengan sumber daya manusia yang terbatas. Keterbatasan waktu dan personel yang tersedia dapat menghambat pelaksanaan yang efektif dari penyusunan profil desa.
50		Evaluasi Kinerja Desa	Keterbatasan data yang dimiliki oleh desa
51		Permendagri 12 Tahun 2007	Tidak melakukan upditing profil desa
52	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Anggaran APBD untuk Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Aset Desa, Aplikasi SIPADES 3.0	Kapasitas SDM Pengelola Aset Desa yang belum kuat.
53	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	SDM Anggota BPD kurang memadahi
54		Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Kurangnya koordinasi antara Pemerintahan Desa dan Anggota BPD
55		Perpanjangan masa jabatan anggota BPD dari 6 tahun menjadi 8 tahun	

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
56		Media pembelajaran mandiri anggota BPD (Sibermata Desa)	
57		Anggota BPD Mengikuti Program P3PD dari Kemendagri	
58	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kurang tertibnya administrasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa
59			Keterbatasan SDM Pemerintahan Desa
60		Permendagri Nomor 46/ 2016	Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa dan Anggota BPD
61	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Keterbatasan Data yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa
62		Permendagri 81 tahun 2015	Pemerintahan desa kurang tertib dalam mengupdate Epdeskel
63	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		
64	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat**		

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
	Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
65	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	anggaran pembinaan dari APBD, Perbub 1/2020 tentang LKD sebagai dasar hukum legalitas LKD, Permendagri no 13 Tahun 2024 tentang Posyandu	Juknis pelaksanaan posyandu belum detail Pemerintah desa belum memahami
66	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	anggaran pembinaan dari APBD, Perbub Perbub 1/2020 tentang LKD sebagai dasar peningkatan kapasitas	tidak semua LKD di libatkan dalam membantu pemerintah desa sesuai tupoksinya
67	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	anggaran pembinaan dari APBD, dukungan pembinaan lintas OPD sesuai tupoksinya	kurangnya dukungan permodalan, kualitas pengemasan produk yang masih rendah dan kurang fasilitasi pemasaran produk

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
68	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	anggaran pembinaan dari APBD, anggarandari APBDes	pemerintah desa belum menjadikan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebagai prioritas pembangunan di desa
69	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	anggaran pembinaan dari APBD	semakin lunturnya nilai gotong royong masyarakat, pemdes kurang aktif melaporkan kegiatan Gotong royong
70	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Perpres 99/2017 dan Permendagri 36/2020 yang mengatur tentang PKK, anggaran fasilitasi pembinaan dari APBD dan APBDesa, dukungan Pengurus TPPKK Kabupaten yang aktif	TPPKK Desa masih banyak yang tidak aktif, hanya menjadikan kegiatan PKK sebagai formalitas, banyak yang tidak membuat laporan tahunan PKK Sinergi TPPKK kabupaten dengan Perangkat daerah masih kurang

IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Laporan Capaian Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2025 yang merupakan penjabaran Renstra DPMD tahun 2024 – 2026. Laporan dimaksud memuat informasi tentang Pencapaian Rencana Kerja Tahun 2025 dan progress capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 yang implementasinya tertuang dalam RKA-K/L, serta permasalahan dan upaya penyelesiannya.

Penyusunan Laporan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada kurun waktu yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini diucapkan banyak terima kasih, semoga dapat bermanfaat dan digunakan sesuai tujuan penyusunannnya

IV.2. Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk tahun 2025 disusun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai, ketersediaan anggaran menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan renja sesuai dengan kebutuhan. Jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan renja maka diperlukan penyesuaian seperti pengurangan sub kegiatan dengan prioritas yang kecuali dalam mendukung IKU maupun IKI.

Untuk pelaksanaan renja diperlukan beberapa kaidah yaitu seluruh unsur perangkat Daerah dan stakeholder terkait harus melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dengan sebaik – baiknya. Setiap unsur perangkat Daerah senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan diperlukan juga koordinasi yang baik antar unsur Perangkat daerah (bersinergi dan kolaborasi untuk menyukseskan pelaksanaan renja tahun berikutnya).

Rencana Tindak lanjut yang perlu dilakukan kedepan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan kegiatan sesuai target yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
2. Memperkuat koordinasi sehingga tercipta sinergi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder Dinas PMD
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala melalui kunjung lapang, pembuatan laporan rakor berkala, pendampingan teknis dan fasilitas lain terutama terhadap jajaran Pemerintahan Desa yang merupakan wilayah binaan Dinas PMD.
4. Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur Kegiatan.
5. Memberikan reward dan punishmen sesuai dengan performasi masing – masing.

Nganjuk, 27 Maret 2025
Kepala Dinas PMD
Kabupaten Nganjuk

PUGUH HARNOTO, SSTP, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19750708 199603 1 001